TAJUK RENCANA

Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

ANDAI kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, warga Ngentak Bangunjiwo Kasihan Bantul tidak viral di media sosial (medsos), akankah menjadi perhatian aparat penegak hukum? Pertanyaan ini wajar diajukan mengingat banyak kasus mafia tanah yang ditangani secara serius setelah viral di media sosial. Diakui atau tidak, medsos menjadi media alternatif yang cukup efektif untuk menginformasikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat meski infonya masih harus diverifikasi media mainstream. Tak heran bila muncul ungkapan sinisme di masyarakat 'no viral no justice'.

Kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon mungkin bisa mewakili belum tertibnya administrasi pertanahan di DIY. Bagaimana mungkin tanah Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi beserta dua rumahnya bisa beralih hak dan berganti nama sertifikatnya tanpa sepengetahuannya ? Lebih misterius lagi, tanah tersebut telah dijadikan agunan kredit senilai Rp 1,5 miliar di sebuah bank yang berujung ancaman penyitaan akibat gagal bayar. Mbah Tupon adalah lansia yang tidak bisa membaca dan menulis alias buta huruf. Agaknya kelemahan inilah yang dimanfaatkan oknum untuk memperdayanya sehingga tanah miliknya beralih hak dan beralih nama.

Diyakini, apa yang menimpa Mbah Tupon adalah bagian dari aksi mafia tanah. Mereka tidak beraksi sendirian, melainkan melibatkan pihak lain. Anehnya, mengapa pula bisa keluar sertifikat atas nama orang lain ? Bukankah Badan Pertanahan sebelum menerbitkan sertifikat harus melakukan verifikasi data sekaligus cek lapangan tentang kebenarannya ? Pun, dalam setiap peralihan hak atas tanah, harus dilakuan di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan harus sepakat dengan isi perjanjian yang dibacakan PPAT. Agaknya, proses ini tidak dilakukan dengan benar.

Mbah Tupon adalah lansia buta huruf yang beritikad baik. Justru kondisi inilah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi. Kita yakin Mbah Tupon tidak mengira bahwa tanahnya bakal beralih dan balik nama ke orang lain, pun tak mengira tanahnya bakal jadi agunan bank untuk mengambil kredit hingga Rp 1,5 miliar yang kemudian gagal bayar dan berujung ancaman penyitaan. Sejak itulah terungkap bahwa Mbah Tupon telah diperdaya oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Kita memberi apresiasi yang tinggi kepada warga Ngentak yang membuat petisi agar tanah Mbah Tupon dikembalikan. Kasus ini juga mengundang perhatian pemangku kepentingan, sehingga mengambil langkah antisipasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pun telah menghentikan proses lelang terhadap sertifikat tanah terkait kasus Mbah Tupon, karena ada sesuatu yang tidak beres (KR 4/5). Sementara Polda DIY juga telah menerjunkan tim untuk menangani kasus ini, setidaknya sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa dari pihak pelapor. Berikutnya nanti akan diperiksa dari pihak terlapor.

Tak hanya itu, polisi juga akan memanggil pihak dari instansi yang menerbitkan sertifikat terkait kasus tanah Mbah Tupon, guna dimintai klarifikasi. Tentu saja PPAT yang menerbitkan akta peralihan hak juga harus dimintai klarifikasi. Dalam hukum positif yang kita anut, akta yang dibuat dengan kecurangan, kebohongan, tipu muslihat, batal demi hukum. Kita mendukung langkah kepolisian untuk memproses hukum kasus ini hingga tuntas. ❑ **- d**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Premanisme dan Pendidikan Kita

Syamsudin

BELUM lama ini premanisme muncul sebagai sesuatu yang seakan-akan menginterupsi obrolan masyarakat. Mulai dari berita tentang lingkungan sekitar, kekerasan di jalan, gangguan pada industri, hingga ke wilayah politik. Publik barangkali memahami premanisme sebagai istilah yang merujuk pada praktik kekuasaan informal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan cara "paksa" dengan segala bentuknya, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, di luar kerangka hukum sah.

Apa dampak yang ditimbulkan ketika premanisme terus berkembang dan meluas? Secara keilmuan, dapat didekati dengan pandangan "anarki", yang dalam hal ini, dipandang sebagai kondisi di mana *power* dijalankan di luar otoritas yang punya hak konstitusional untuk bertindak "paksa". Lebih dari itu, suatu kondisi di mana *power* dijalankan dengan tanpa norma keadilan dan kemanusiaan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa para pelaku memiliki pandangannya sendiri yang membenarkan tindakan tersebut. Namun jika dilihat dari kacamata bernegara, ini sudah menjadi masalah yang sangat serius.

Bila dilihat dari sudut pandang hegemoni, premanisme akan terlihat bahwa praktek yang menghidupkan hegemoni kekuasaan informal yang menundukkan warga melalui kekuatan budaya dan tekanan fisik. Sementara itu, bila ditinjau dari sudut pandang yang menganggap kekuasaan tidak hanya yang formal, atau kekuasaan sebenarnya ada di mana-mana, maka premanisme menjadi bentuk kongkrit dari pandangan itu, yakni bahwa sesungguhnya ada kerja dari suatu "kuasa informal" dan bagaimana kuasa tersebut tidak hanya bekerja dari atas (negara), tetapi juga dari bawah dalam bentuk kontrol sosial informal.

Keberlangsungan premanisme, tentu akan punya dampak besar, jauh di luar soal "tindakan paksa"nya. Beberapa dampaknya antara lain keberadaan premanisme akan mudah dibaca sebagai ketidakhadiran negara. Secara demikian, akan mengerosi kepercayaan publik terhadap negara hukum (*rule of law*). Kedua, di kalangan masyarakat kebanyakan akan berkembang rasa takut, dan pada gilirannya akan membentuk budaya ketakutan dan subordinasi. Ketiga, di atas itu semua, praktek tersebut akan berpotensi merusak legitimasi negara sebagai pelindung hak warga negara.

Problem Struktural

Para ilmuwan sosial sebenarnya telah lama melihat masalah ini sebagai problem serius, yang tidak dapat dilepaskan dari realitas struktur sosial. Bahkan ada yang mengatakan, keberadaan premanisme seakan-akan memberi petunjuk tentang apa yang ada "di bawah bukit es". Premanisme tidak hanya dibaca sebagai gejala kriminalitas, melainkan dapat dibaca sebagai sebuah ekspresi dari ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Satu, keberadaan premanisme seakan-akan menunjukkan tidak optimalnya tindakan otoritas dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam masyarakat yang adil dan merata, tindakan kekerasan informal tidak memiliki ruang. Dua, berdasarkan itu semua, dapat dikatakan masyarakat seakan-akan belum tersusun sebagai institusi dengan prinsip keadilan distributif. Premanisme muncul justru ketika distribusi sumber daya, peluang, dan perlindungan hukum sangat timpang. Artinya, premanisme semacam tanda bahwa prinsip keadilan belum dijalankan dengan benar. Tiga, dalam situasi yang masih terus berlangsung, tidak terhindarkan berkembangnya pandangan yang seakan-akan ada pembiaran, dan bahkan sebagian mengatakan ada "perlindungan" dari oknum-oknum yang mengingkari sumpah jabatannya.

Pendidikan Kita

Sebagai awal kajian, hendak diusulkan di sini, untuk melihat masalah kompleks tersebut, menjadi bagian dari masalah pendidikan. Usulan ini tidak hendak menyederhanakan atau mengalihkan, melainkan justru hendak secara kreatif menemukan jalan utama bagi suatu penyelesaian yang lebih bersifat fundamental, yakni dengan menempatkannya sebagai bagian dari problem Pendidikan. Pada titik inilah, kita barangkali perlu mengungkap dua aspek utama yang telah menjadi perhatian publik, yakni:

Satu, apa yang disebut sebagai reduksi peran pendidikan, yang dikatakan terlalu berfokus pada kognisi, lupa pada etika. Peran mulia, yakni membentuk manusia (humanisasi) seutuhnya, bergeser menjadi sekadar penghasil tenaga kerja dan penyedia *skill*. Akibatnya, munculnya premanisme tidak dianggap sebagai problem pendidikan, karena pendidikan hanya mengukur keberhasilan lewat angka dan nilai, bukan lewat watak sosial atau keadilan kolektif.

Dua, apa yang dapat kita sebut sebagai minimnya narasi etis dalam Pendidikan. Premanisme, dalam bentuk paling dalamnya adalah "kegagalan etika". Subjek bertindak tanpa orientasi pada kebaikan bersama. Jika pendidikan tidak lagi mengajarkan dan menghidupi terus-menerus moral, etika sosial, dan kewargaan reflektif, maka wajar bila kapasitas publik untuk mencegah yang merusak etika sosial, tidak tersedia secara optimal. Perbaikan kedua hal tersebut, akan merupakan cara strategis dalam membangun masyarakat yang setia pada moral dan etika publik. **(*)-d**

***)Syamsudin MA**, Dekan Fisipol UP'45.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Larinya Investor Asing

Ignatia Eka Puspita K

BEBERAPA tahun terakhir, berbagai perusahaan asing ternama berencana melakukan investasi di Indonesia. Namun sayangnya, harapan jauh dari kenyataan. Tesla dan Google batal dan menunda investasinya di Indonesia. Di sisi lain, Apple tetap berinvestasi di Indonesia hanya saja nilainya kurang lebih Rp 1,6 triliun. Nilai yang sangat kecil dibanding investasinya di Vietnam (sekitar Rp 255 triliun). Yang terbaru, LG Energy Solution batal melakukan investasi meski sudah melakukan negosiasi selama 5 tahun. Seorang pejabat LG Energy Solution, menyatakan, penarikan proyek ini dilakukan setelah menimbang kondisi pasar dan lingkungan investasi.

Sejatinya Indonesia memiliki potensi besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis di Asia, Indonesia seharusnya menjadi magnet investasi dunia. Sayangnya, potensi itu belum diimbangi dengan kesiapan yang dibutuhkan para investor global.

Salah satu investasi besar yang saat ini sedang berlangsung adalah proyek pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina, BYD, di Subang. Sayangnya, proyek ini mendapatkan gangguan di antaranya: pemalakan dan pemblokiran akses oleh ormas. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, aksi premanisme ini dapat meningkatkan risiko terhadap kelangsungan investasi. Fenomena yang dialami oleh BYD ini memberikan sinyal negatif bagi iklim investasi di Indonesia, yang mana ketidakpastian non-ekonomi menambah beban di luar biaya dan regulasi.

Alasan Utama Investor Asing Enggan ke Indonesia

Pertama, biaya produksi. Biaya produksi di Indonesia masih kalah kompetitif dengan Vietnam. Dilansir dari situs CEOWORLD Magazine, pada tahun 2024 upah rata-rata di Indonesia adalah US$ 344/bulan sedang Vietnam lebih rendah yaitu US$ 290/bulan.

Kedua, energi dan infrastruktur. Tesla enggan mendirikan pabrik di Indonesia karena penggunaan listrik di Indonesia yang masih mengandalkan tenaga fosil, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsipnya. Google juga menunda investasi pusat data karena pasokan listrik yang belum stabil. Di sisi lain, logistik pun mahal. Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 61 Logistics Performance Index, jauh di bawah Vietnam yang berada di urutan 43.

Guru Besar dan ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, berpendapat bahwa faktor kebijakan ekonomi yang kerap diluncurkan secara tiba-tiba oleh pemerintah dapat mengakibatkan perginya investor asing. Selain itu, defisit APBN 2025 yang melebar hingga penerimaan pajak yang "seret" semakin menimbulkan ketidakpastian pelaku pasar. Menurutnya, investor memilih menarik diri lebih dini daripada menghadapi risiko besar kehilangan modal.

Dr. Ko Young-Kyung dari Researcher Professor of ASEAN Center, Asiatic Research Institute, Korea University juga turut berkomentar. Menurutnya, ekonomi Vietnam yang berorientasi pada ekspor memberi nilai strategis bagi perusahaan. Vietnam sudah menikmati tarif ekspor hampir nol ke Uni Eropa di bawah EVFTA, sedangkan Indonesia masih merampungkan IEU-CEPA dan belum bergabung CPTPP.

Perbaikan Perlu Diupayakan oleh Pemerintah Indonesia

Pemerintah harus bergerak menghadapi kondisi ini. Langkah awal adalah memberikan kepastian aturan. Omnibus Law investasi dituntaskan agar semua perizinan memakai aturan yang sama dan birokrasi disederhanakan. Aturan baru atau penyesuaian tarif juga perlu dipikirkan matang-matang agar perusahaan asing dapat memperhitungkan untung-ruginya dengan pasti.

Kedua, Indonesia perlu mempercepat transisi energi bersih untuk mendukung industri masa depan. Menyediakan kawasan industri berbasis energi terbarukan akan menjadi nilai jual besar.

Ketiga, Indonesia perlu lebih ofensif dalam memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Keuntungannya adalah tarif yang lebih rendah sehingga harga ekspor lebih murah dan biaya logistik turun karena bebas tarif.

Yang terakhir, penegakan hukum bagi tindakan premanisme dan pelanggaran etika.

Investasi asing bukan sekadar deretan angka di BKPM, investasi ini juga membawa transfer teknologi, lapangan kerja, dan reputasi ekonomi. Jika Indonesia mampu menekan biaya, memberi kepastian dan jaminan, serta menunjukkan komitmen hijau, tak ada alasan bagi investor untuk berpaling. (*)-d

***)Ignatia Eka Puspita K., S.Ak., MBA.**, Dosen Departemen Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Pojok KR

Presiden Prabowo ingin biaya haji Indonesia lebih murah dari Malaysia.

- Tak hanya keinginan, tapi harus direalisasikan.

***

Polda DIY atensi kasus Mbah Tupon, 11 saksi diperiksa.

- Menunggu tersangkanya.

***

Di Bantul, berniat pecah sertipikat, malah beralih ke pihak lain.

- Yang menerbitkan perlu diklarifikasi.

Berabé